



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG BINA TENAGA dan POTENSI Pencarian dan
PERTOLONGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TARJONI
2. Jabatan : DIREKTUR BINA TENAGA
3. NHK : 880632

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.639.380.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.115 m²/300 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 909.080.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 333 m²/21 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.033.300.000
3. Tanah Seluas 160 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 873.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m²/128 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.236.000.000
5. Tanah Seluas 410 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.322.000.000
6. Tanah Seluas 700 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.121.000.000
7. Tanah Seluas 400 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 610.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 535.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 116.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 110 CC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.



9.500.000

3. MOBIL, TOYOTA INNOVA TYPE G Tahun 2005, HASIL SENDIRI

Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 603.200.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 578.673.907

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 8.937.753.907

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.937.753.907

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.